



KONDISI SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA PONGGOK

Widyanani¹, Wira Handika², Resti Oktaviani³, dan Iming⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Banten Raya

widyananani_love@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial budaya dan kelembagaan dalam pengembangan desa wisata yang berfokus di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Tujuan utama dalam laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya dan kelembagaan dalam pengembangan desa wisata dan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata di desa Ponggok. Penelitian ini menyoroti kondisi sosial budaya di Desa Ponggok. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mencakup peran penting pemerintah desa dan keterlibatan kelembagaan dalam mengembangkan desa wisata. Dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Ponggok terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi melalui report harian, bulanan, dan triwulan. Faktor pendukung utama dalam implementasi analisis ini adalah partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari pihak-pihak kelembagaan. Sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang konsep desa wisata dan cara pengelolaannya. Dahulu desa ini termasuk dalam kategori desa termiskin dengan pendapatan desa hanya Rp80 juta/tahun. Bahkan pada 2001 desa ini ditetapkan sebagai desa dengan kategori Infrastruktur Desa Tertinggal. Namun sejak kepemimpinan Kepala Desa Junaedhi Mulyono 2006, desa ini mulai melakukan perubahan melalui pengembangan potensi desa. Desa Ponggok memiliki potensi alam berupa sumber mata air jernih, segar dan melimpah dengan Umbul Ponggok sebagai objek wisata andalan.

Kata Kunci: Desa Ponggok, Pemerintah Desa, Desa Wisata, BUMDes, Kondisi Sosial.

Abstract

This research aims to analyze the socio-cultural and institutional conditions in the development of tourist villages focusing on Ponggok Village, Klaten Regency. The main objective in this report is to find out how the socio-cultural and institutional conditions in the development of tourism villages and how the evaluation conducted by the village government in developing tourism villages in Ponggok village. This research highlights the socio-cultural conditions in Ponggok Village. The method used in this research is a descriptive research method with a qualitative approach using data collection techniques in this research through interviews, observation and documentation. This research covers the important role of village government and institutional involvement in developing tourism villages. In implementing the program run by the Ponggok Village government, there are several evaluations carried out, namely evaluation through daily, monthly and quarterly reports. The main supporting factors in the implementation of this analysis are the active participation of the community and support from institutional parties. Some people do not have a deep understanding of the concept of a tourist village and how to manage it. The conclusion of this study shows that the role of institutions is crucial in the development of tourist villages. In the past, this village was categorized as the poorest village with a village income of only Rp80 million/year. In 2001, the village was even designated as a village with a category of Underdeveloped Village Infrastructure. However, since the leadership of Village Head Junaedhi Mulyono in 2006, the village has begun to make changes through the development of village potential. Ponggok Village has natural potential in the form of clear, fresh and abundant springs with Umbul Ponggok as the main attraction.

Keywords: Ponggok Village, Village Government, Tourism Village, BUMDes, Social Conditions.



PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam dekade terakhir untuk pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang (Ekanayeke dan Long, 2012). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengandalkan sektor pariwisata. Negara dengan ribuan pulau ini mempunyai potensi wisata alam, sosial, dan budaya yang besar (Suryani, 2016). Potensi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia dimana dapat menawarkan berbagai macam pilihan destinasi pariwisata bagi wisatawan. Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) daya saing pariwisata Indonesia tahun 2017 menempati peringkat 42 secara global. Peringkat Indonesia di Asia Tenggara masih di bawah Thailand (32), Malaysia (26), dan Singapura (13). Berita baiknya adalah peringkat Indonesia dari Tahun 2008-2017 selalu mengalami peningkatan. Hal itu menjadi modal yang positif untuk terus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Pada tahun 2020, sektor pariwisata diharapkan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Saat ini sektor pariwisata menempati peringkat kedua, di bawah minyak sawit mentah. Kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat setiap tahunnya. Data-data positif tersebut membuat sektor pariwisata optimis dalam harapannya menjadi sektor unggulan di Indonesia.

Pengembangan pariwisata merupakan hal yang sangat kompleks sehingga harus melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta (Kuhaja, 2014). Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal yang

tinggal di sekitar objek wisata (Putra, 2013). Hal itu dapat terjadi jika masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pariwisata. Keterlibatan masyarakat juga dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan adanya kelembagaan yang dibentuk sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kelembagaan lokal sebagai wadah aktivitas kolektif masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata (Darwis et al., 2016). Keterlibatan semua pemangku kepentingan tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Peran pemerintahan dalam Kemajuan pembangunan suatu desa dapat dicapai melalui pemberdayaan potensi ekonomi atas dasar kebutuhan masyarakat desa itu sendiri (Sutoro, 2015) Dalam rangka menjembatani antara desa dengan kegiatan perekonomiannya, UU No 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan Pemerintah Desa untuk membentuk kelembagaan yang dapat mendukung aspek perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Organisasi BUM Desa diharapkan menjadi pilar kegiatan perekonomian desa yang dapat membawa sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Febryani et al (2019) dan Kinasih et al (2020). Pendapatan Asli Desa (PAD menunjukkan bahwa BUM Desa berperan sebagai lembaga yang memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan unit-unit usaha yang disesuaikan dengan potensi desa. Pengelolaan aset melalui BUMDesa ini pada akhirnya memberikan manfaat



terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Namun demikian, berkembangnya BUM Desa tidak lepas dari peran aktif Pemerintah Desa. Mayu (2016) menjelaskan bahwa kepemimpinan, manajerial, dan tata kelola Pemerintah Desa diperlukan dalam perkembangan dan keberlanjutan pembangunan desa yaitu melalui pendistribusian ide, gagasan, dan manfaat pembangunan kepada masyarakat desa. Diperkuat dengan Sofyani et al. (2018), Pemerintah Desa juga memiliki peran dalam melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya serta melakukan pendekatan persuasif untuk merubah pola pikir masyarakat agar menjadi lebih mandiri. Sinergi dan kolaborasi Pemerintah Desa dengan pemangku kepentingan lainnya ini dinilai mampu mempercepat pengembangan kawasan perdesaan (Febrian, 2016).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, disebut pula sebagai destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata).

Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten merupakan desa yang mampu keluar dari status desa tertinggal menjadi desa mandiri. Dahulu desa ini termasuk dalam kategori desa termiskin dengan pendapatan desa hanya Rp80 juta/tahun. Bahkan pada 2001 desa ini ditetapkan sebagai desa dengan kategori Infrastruktur Desa Tertinggal. Namun sejak kepemimpinan Kepala Desa Junaedhi Mulyono 2006, desa ini mulai melakukan perubahan melalui pengembangan potensi desa. Desa Ponggok memiliki potensi alam berupa sumber mata air jernih, segar dan melimpah dengan Umbul Ponggok sebagai objek wisata andalan. Desa Ponggok memiliki beberapa objek wisata, antara lain Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Sigedhang, dan Waduk Galau. Selain itu, Desa Ponggok juga menawarkan wisata edukasi terkait tata kelola desa dan BUMDes, pengelolaan wisata, budidaya perikanan, budidaya maggot, ketahanan pangan, pertanian, pengelolaan sampah, dan UMKM.

Upaya pengembangan desa Ponggok diawali dari pengajuan permintaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengobservasi permasalahan dan menggali potensi desa. Kegiatan ini adalah titik awal perkembangan desa Ponggok menuju kemandirian perekonomian. Pemerintah desa Ponggok menyadari bahwa desa yang maju dan sejahtera merupakan tujuan yang harus dicapai namun disadari adanya keterbatasan kapasitas yang dimilikinya sehingga diperlukan inisiatif-inisiatif kolaborasi dan pelibatan stakeholder lain. Desa Ponggok adalah desa wisata yang terletak 40 km dari Yogyakarta, berada di Kecamatan



Polanharjo. Desa ini termasuk BUMDes (Badan Usaha Manajemen Desa) terbaik ditingkat nasional serta mendapatkan penghargaan sebagai desa trendi. Desa yang awalnya di sebut sebagai desa termiskin sekarang telah bertransformasi menjadi desa yang berpendapatan tinggi berkat keberhasilan mengelola dana desa. Keberhasilan ini diperoleh dari pemanfaatan potensi wisata yang ada di desa tersebut salah satunya umbul ponggok, yaitu umbul yang paling menonjol diantara umbul-umbul lain yang ada di desa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa ponggok terhadap status desa wisata. Menyandang status sebagai Desa Wisata membuat perubahan serta kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang dialami masyarakat desa diantaranya kehidupan masyarakat desa menjadi lebih modern, banyak masyarakat yang beralih profesi yang awalnya petani menjadi pekerja jasa wisata, hal ini membuat pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut mengalami peningkatan. Pengelolaan objek wisata ini juga membuat masyarakat dapat meningkatkan keterampilan serta kreatifitas dalam hal membuka serta mengelola usaha yang telah mereka bangun.

Kelembagaan lokal yang dapat mengelola pariwisata salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah kelembagaan lokal desa di bawah naungan pemerintah desa. Pembentukan BUMDes bukan hal yang baru dalam pengembangan desa. Hal tersebut dapat dilihat sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah pada pasal 213 bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa 2 diberi kesempatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDes. Dasar peraturan tentang desa dan BUMDes secara lebih spesifik dan terbaru tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan inovasi menurut Cook, Matthew, dan Irwin dalam Ningtias (2018:34). Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat desa dan pemerintah Desa Ponggok yang terlibat dalam pengembangan desa dan objek penelitian ini mencakup rencana aksi pemerintah desa dan pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk menciptakan desa mandiri berbasis desa wisata. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 7-10 Juli 2024 dan bertempat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Usman (2009:85), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan



tujuan dan kegunaan tertentu. Agar penelitian dapat teruji serta dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu penelitian haruslah menggunakan metode-metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku, dengan tentunya memperhatikan kesesuaian kondisi lapangan tempat praktik penelitian dilakukan. (Maryana:2018:76).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Desa Ponggok

Desa Ponggok awalnya merupakan desa yang unik karena ada sebuah mata air yang sangat jernih yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa Ponggok khususnya dan masyarakat desa lain yang pada umumnya. Cerita punya cerita oleh para leluhur / pinisepuh dulu mata air atau yang sering kita sebut umbul, bahwa umbul tersebut diperkirakan akan menjadi sebuah telaga yang sangat besar dan bisa menggenangi pemukiman penduduk sekitarnya, karena mempercayai ada sebuah firasat munculnya sepasang ikan yang menyerupai gereh pethek. Guna mengantisipasi agar umbul air tidak membesar oleh nenek moyang kemudian menanggapi ledhek yang diiringi oleh gamelan komplit dengan niyogonya yang kemudian waranggono beserta gamelannya hilang dan secara tiba-tiba datang seekor burung pungguk yang sangat besar hinggap di plogrok/pojok pohon gayam, dengan bahasa isyarat burung pungguk tersebut bisa menunjukkan salah satu alat gamelan yang menyerupai gong masih utuh terpelihara dengan baik.

Karena jasa burung yang berada di plogrok masyarakat sekitar tertuju diplogrok untuk melihat keberadaan burung pungguk yang terkesan ajaib itu. Untuk mengingat peristiwa tersebut

kemudian oleh para pinisepuh desa ini dinamakan kampung ponggok, sampai sekarang pun mata air yang disebut Umbul Ponggok digunakan untuk mandi bahkan dipercayai oleh masyarakat luas merupakan sumber mata air yang suci bisa membawa berkah khususnya diwaktu menjelang puasa, ada sebuah tradisi Padusan Umbul Ponggok yang sampai sekarang di era modern tradisi padusan Umbul Ponggok masih ada dan selalu dikunjungi banyak orang. Bahkan pada masa penjajahan Belanda desa ini dijadikan sebuah kota kewedanan karena lokasi yang sangat strategis dan berpotensi maka dibangun sebuah pabrik gula yang dikelilingi bangunan loji yang besar dan sangat megah menghadap timur bersebelahan dengan umbul yang ditandai Prasasti Bunga Tanjung, yang sampai saat ini juga masih utuh untuk hiasan didepan SDN Ponggok. Tempat kantor telepon dan rel jalan lori pengangkut tebu melintasi areal sawah-sawah dengan perkembangan terakhir pabrik gula di Ponggok digunakan sebagai gudang sedang pabriknya berada diwilayah kecamatan karanganom. Pemerintah Desa Ponggok terbentuk setelah adanya ukur tanah yang meliputi dukuh Ponggok, Jeblogan, Kiringan dan Umbulsari yang dijabat oleh seorang Kepala Desa I bernama Amat Sumangun dan dilanjutkan Kepala Desa II bernama R. Karto Hudoyo. Sehabis G30 S PKI Kepala Desa III dijabat Bp. Jinu Sastro Mulyono sampai tahun 1988 dilanjutkan Kepala Desa IV Bp. H. Sunarta dari tahun 1990 s/d 2007 yang masa berakhirnya 12 Januari 2007, diadakan pemilihan kepala desa kembali yang akhirnya pejabat Kepala Desa V sekarang Bp. Junaedhi Mulyono,SH beliau akan menjabat sampai tahun 2019.



2. Sejarah Berdirinya BUMDes

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, kemudian berdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Ponggok melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok warga untuk membahas isu-isu strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Ponggok melakukan praktik deliberative democracy untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan nama BUMDes Tirta Mandiri

BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok dalam perjalanannya mengalami banyak kendala, walaupun sudah menjadi keputusan bersama tetapi masih ada kelompok masyarakat yang memandang sebelah mata. Sentimen negatif berkembang sehingga masyarakat semakin pesimis BUMDes bisa berkembang apalagi membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Belum lagi masalah keterbatasan SDM, sangat sulit menemukan orang yang betul-betul mau berjuang untuk merintis dan mengelola BUMDes, selain BUMDes merupakan lembaga yang baru. Tetapi bukan berarti tidak ada orang yang mau mendukung dan berjuang walaupun hanya beberapa saja. Awal terbentuknya BUMDes usaha yang dikelola hanya toko pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat serta merintis kegiatan pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motivasi yang tiada henti dari Kepala Desa Ponggok, perlahan-lahan namun pasti BUMDes mengalami pergerakan yang lebih baik. Dalam jangka waktu satu tahun BUMDes sudah menghasilkan laba Rp. 100.000.000,- dan disetor sebagai PAD sebesar Rp. 30.000.000,- (30% dari laba) pada Tahun 2010.

Mulai Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Ponggok mengembangkan semua Obyek Wisata yang dimiliki sehingga potensi dan aset desa bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat maupun PAD dalam melangsungkan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan mengelola satu Obyek Wisata saja yaitu Umbul Ponggok pada Tahun 2014 PAD yang diterima dari hasil usaha BUMDes sudah



sebesar Rp. 350.000.000,- apabila Ponggok mengelola lima Obyek Wisata, pendapatan yang diterima akan bertambah. Keberadaan BUMDes sangat berdampak manfaatnya bagi masyarakat karena mampu mengurangi angka pengangguran, di Desa Ponggok melalui penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan BUMDes yang berjumlah 25 Orang.

Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat dengan dibukanya kios-kios kuliner untuk masyarakat di lokasi obyek wisata Umbul Ponggok, serta menumbuhkan iklim investasi bagi masyarakat, karena BUMDes sudah berhasil go public dengan menjual saham kepada masyarakat Ponggok untuk mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan usaha BUMDesa.

3. Unit Usaha BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok

Desa Ponggok sedang mewujudkan mimpi bersama wisata yang mandiri yang mampu mengolah potensi desa secara adil, merata, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan dengan cara bekerjasama dengan Masyarakat sekitar dan diadakannya unit usaha BUMDes. Beberapa unit usaha BUMDes Desa Ponggok yang sering disebut dengan unit usaha BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, di antaranya:

- 1) Umbul Ponggok, BUMDes Tirta Mandiri; mengelola sumber air (umbul) milik warga, dari, dan untuk arga
- 2) Ponggok Ciblon, di Ponggok Ciblon terdapat kolam renang, taman bermain air (*water park*), resto yang cocok untuk pertemuan dan acara keluarga

- 3) Toko Desa, minimarket yang dilengkapi dengan *Rest Area* dan *ATM center*.
- 4) *Guest House*, tempat ini berada tepat disamping Umbul Ponggok. Tamu dapat langsung masuk ke umbul lewat lantai atas
- 5) *Study Desa*, berbagi pengalaman membangun desa, pemberdayaan Masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup
- 6) Gedung dan *Event Organizer*, Gedung balai desa disewakan untuk tempat penyelenggaraan event dan resepsi pernikahan
- 7) Kios Kuliner, tempat ini disewakan untuk arena kuliner

Unit Usaha Lain, Bumdes Tirta Mandiri memiliki kredit/*finance*, rental mobil, pengelolaan air bersih, *corporate farm* (pertanian & perikanan).

Tata Nilai atau Perilaku Masyarakat Desa Ponggok Dalam Pengembangan Desa Wisata

Menurut Tjahjo Noegroho selaku pematari pada kegiatan *Studybanding* di Desa Ponggok – 2024, ia mengatakan sebelum Desa Ponggok menemukan potensi Umbul Ponggok yang dapat dikembangkan menjadi wisata, secara umum tata nilai masyarakat desa Ponggok masih kental dengan budaya gotong royong, guyup rukun, Padusan, sedekah bumi, dan Paternalistik.

Guyub memiliki arti kebersamaan sedangkan rukun memiliki arti perdamaian. Guyub rukun dapat diartikan sebagai suatu kebersamaan yang ada di dalam masyarakat harus dimulai dengan adanya kerukunan, contohnya seperti kerja bakti atau gotong royong masyarakat.



Mengutip dari buku Manunggaling Islam Jawa karya Rojikin, dijelaskan bahwa Padusan adalah bersuci dari hadas kecil maupun besar. Secara umum, makna dari Padusan adalah sebuah tradisi sebagai titik awal untuk memulai amalan-amalan di bulan suci Ramadhan.

Upacara sedekah bumi sendiri adalah tradisi yang dilakukan pada awal bulan Muharam atau Syura. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat kita berpijak dengan segala rezeki berupa hasil bumi untuk keberlangsungan hidup manusia. Upacara Tradisi Sedekah Bumi atau lebih dikenal dengan sebutan dekah deso dilakukan oleh masyarakat Desa yang biasanya membawa hasil bumi.

kepemimpinan paternalistik kerap ditemukan dalam organisasi atau budaya yang hubungan antara pemimpin dan anggotanya mirip dengan hubungan orang tua dan anak-anaknya.

Pemimpin tersebut membuat keputusan berdasarkan apa yang ia percayai sebagai yang terbaik untuk organisasi dan anggotanya, meskipun sering kali tanpa meminta masukan atau konsultasi dengan anggotanya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan paternalistik cenderung memiliki kontrol penuh atas keputusan serta arah organisasinya. Pemimpin paternalistik juga cenderung melindungi anggota mereka dan kerap kali merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka.

Dukungan Lembaga Sosial Terhadap Pengembangan Desa Wisata

Keterlibatan masyarakat Ponggok dalam pengembangan Desa Wisata diwadahi oleh BUMDes Tirta Mandiri. Peran BUMDes

Tirta Mandiri dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok dirumuskan menjadi tiga, yaitu peran dalam penyadaran (*conscientization*), pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), dan penghantaran sumber daya manusia (*resorce delivery*). Adanya peran BUMDes dalam pengembangan desa wisata diharapkan dapat mengubah masyarakat yang awalnya hanya obyek bisa menjadi subyek pembangunan.

KESIMPULAN

Desa Ponggok telah mengalami transformasi yang luar biasa dari desa tertinggal menjadi desa wisata yang sukses. Hal ini menunjukkan bahwa potensi lokal yang dikelola dengan baik dan partisipasi aktif masyarakat dapat membawa perubahan besar. Peran penting masyarakat: Masyarakat Desa Ponggok memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pengembangan desa wisata. Partisipasi aktif mereka dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pengelolaan usaha, menjadi kunci keberlanjutan. Peningkatan ekonomi: Pengembangan desa wisata telah memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat Desa Ponggok. Terbukanya lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan, dan tumbuhnya usaha-usaha kecil menengah merupakan beberapa contohnya. Tantangan kelembagaan: Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, Desa Ponggok masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal kelembagaan. Koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penyusunan tata kelola yang baik masih perlu terus ditingkatkan.



Keterlibatan masyarakat Ponggok dalam pengembangan Desa Wisata diwadahi oleh BUMDes Tirta Mandiri. Peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok dirumuskan menjadi tiga, yaitu peran dalam penyadaran (*conscientization*), pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), dan penghantaran sumber daya manusia (*resorce delivery*). Adanya peran BUMDes dalam pengembangan desa wisata diharapkan dapat mengubah masyarakat yang awalnya hanya obyek bisa menjadi subyek pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____ (2024, 7 8). Retrieved from badan pusat statistik kabupatn klaten: <https://klatenkab.bps.go.id/>
- Andriyani, a. a. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasi Terhadap Ketahanan Social Budaya (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali).
- atmoko, t. p. (2014). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. 147.
- dewi, m. h. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. 132.
- dkk, h. h. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya di Indonesia.
- hermawan, h. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. 117.
- ibori, a. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni. 90-100.
- idajati, i. p. (2017). Karakteristik Desa Berdasarkan Kriteria Community Based Tourism di Desa Wisata Kamasan, Kabupaten Klungkung. 194.
- iskandar, d. h. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Ponggok). 121.
- masitah, i. (2010). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. 49.
- masitah, i. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. 46.
- muktiali, i. t. (2015). Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Ekonomi dan Sosial Masyarakat. 361-372.
- sastrayuda, g. s. (2010). konsep pengembangan kawasan desa wisata. Retrieved from <http://file.upi.edu/>
- supriharjo, f. z. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. 46.
- warman, a. m. (2012). Kepariwisata dan Perjalanan. jakarta: raja grafindo persada

